

MENEROPONG *QUALITY EDUCATION* DI INDONESIA PASCA PANDEMI

Gilang Agung Prabowo

Mahasiswa Magister Sosiologi UMM
Email: Gilangagungprabowo@Gmail.com

***Abstract:** Online learning during the COVID-19 pandemic, there are many obstacles experienced by schools and teachers so that Indonesia needs to find a new formula in designing quality education in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs). the type of this research is a literature study research. The data collection method used is by using Big Data Analysis. The results show that education in Indonesia is ranked 5th and 2nd place below Malaysia. In addition, more than 70% of classrooms at every level of education were damaged. The percentage of teachers who have the proper qualifications to teach at the elementary, junior high, and vocational levels in 2020 is 90%. However, this development is not matched by the percentage of teachers who are qualified to teach at the high school level which has decreased from the previous 97.95 percent to 89.93. Papua province occupies the lowest school participation rate in Indonesia and the Special Region of Yogyakarta has the highest school participation rate in Indonesia, namely 97.07%. Quoted from Katadata.co.id in 2020 that 92% of respondents aged 17 years and over learn to feel a lot of problems in participating in online learning*

***Keywords:** Education, Covid-19 Pandemic, SDGs Goals*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memperhatikan Pendidikan sebagai salah satu pilar dasar dalam membangun sebuah Negara, Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap Warga Negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap Warga Negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. bahkan dalam ayat (4) dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang Undang dasar tersebut pemerintah membuat program wajib belajar sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar tersebut maka pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerinta daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada tingkat dasar secara gratis. Namun Pada awal 2020 Pendidikan di Indonesia seolah mati suri menghadapi masa Pandemi Covid 19, pemerintah terpaksa melakukan penutupan sekolah karena wabah virus Corona, penutupan sekolah tersebut pertama kali dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Maret 2020. Selain itu, Anies Baswedan juga menunda pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berlangsung kala itu, keputusan berani ini akhirnya diikuti oleh beberapa pemerinta

daerah hingga akhirnya diikuti beberapa pejabat daerah hingga akhirnya diikuti hampir seluruh sekolah di Indonesia.

Menghadapi kondisi yang demikian akhirnya pemerintah mengusulkan pelaksanaan pembelajaran secara dalam jaringan (DARING) agar pembelajaran dapat berjalan secara harmonis ditengah pandemi covid 19. Dalam Implementasinya pelaksanaan daring terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh Guru dan Siswa, seperti terbatasnya Kuota untuk pembelajaran daring, masalah ketersediaan *device* untuk pelaksanaan pembelajaran Daring, hingga jaringan akses internet yang tidak dapat menjangkau beberapa daerah terpencil di Indonesia.

Perlu dipahami pendidikan adalah sebuah hal penting yang harus dilaksanakan sebagaimana agenda pembangunan berkelanjutan 2030 oleh Negara Negara Anggota PBB pada tanggal 25 September 2015. Dalam agenda pembangunan tersebut atau disebut dengan *Sustainable Development Goal (SDGs)* terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Dalam pelaksanaan tersebut maka pemerintah Indonesia mencanangkan beberapa target terkait terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, terutama pendidikan pasca pandemi covid 19, tulisan ini membahas mengenai reformasi pendidikan berkualitas sebagaimana yang dicanangkan oleh PBB dengan apa yang disebut dengan SDGs pada point pendidikan yang berkualitas, Negara Indonesia sudah seharusnya kembali pulih untuk membangun pendidikan yang lebih baik pasca terjadinya pandemi covid 19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian Pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan Big Data Analisis dimana proses pengolahan data terdiri dari *Colect* (mengumpulkan), *Store* (Menyusun), *Transform* (Mengolah) dan analisis (menganalisis). Sumber data yang digunakan adalah streaming data (Internet) dan Media Sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan di Indonesia sebelum masa pandemi

Disadari atau tidak pendidikan di Indonesia bukanlah pendidikan yang terbaik di Dunia, dikutip dari CNBC Indonesia pada 16/12/2020 Indeks pembangunan manusia RI no 107 dari 189 Negara. Bahkan di kawasan Asia Tenggara pun Indonesia berada pada peringkat ke 5 dan berada 2 peringkat di bawah negara tetangga Malaysia.

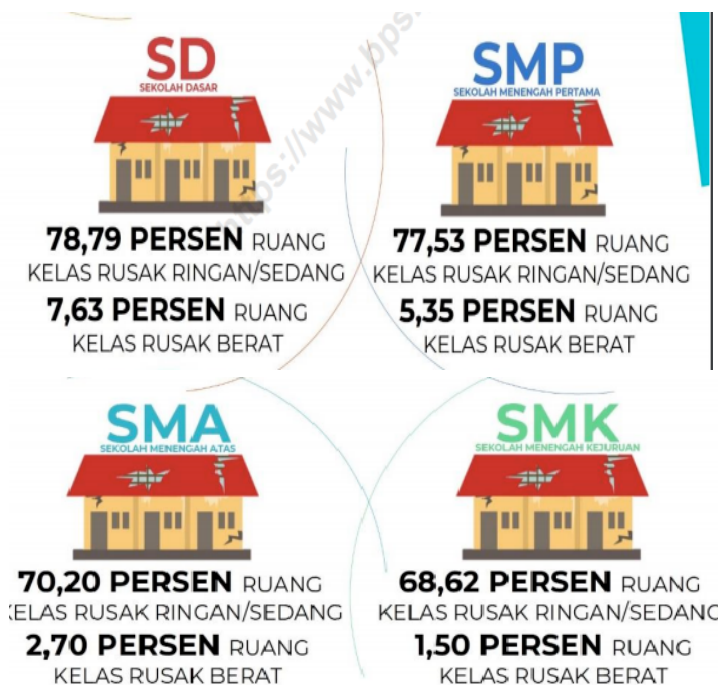
Indikator Pembangunan Manusia

Negara	Ranking	IPM	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	GNI/Kapita (US\$)
Singapura	11	0.938	83.6	16.4	11.6	88.16K
Brunei Darussalam	47	0.838	75.9	14.3	9.1	63.97K
Malaysia	62	0.810	76.2	13.7	10.4	27.53K
Thailand	79	0.777	77.2	15.0	7.9	17.78K
Indonesia	107	0.718	71.7	13.6	8.2	11.46K
Filipina	107	0.718	71.2	13.1	9.4	9.78K
Vietnam	117	0.704	75.4	12.7	8.3	7.43K
Laos	137	0.613	67.9	11.0	5.3	7.41K
Kamboja	144	0.594	69.8	11.5	5.0	4.25K
Myanmar	147	0.583	67.1	10.7	5.0	4.96K

Catatan : IPM (Indeks Pembangunan Manusia), UHH (Usia Harapan Hidup), HLS (Harapan Lama Sekolah), RLS (Rata-rata Lama Sekolah), GNI (Gross National Income)

Dari data tersebut diatas maka IPM (indek harapan Hidup), UHH Harapan alam sekolah, (HLS) pendapatan nasional perkapiita Indonesia bukanlah yang terbaik di kawasan asia tenggara dan Dunia.

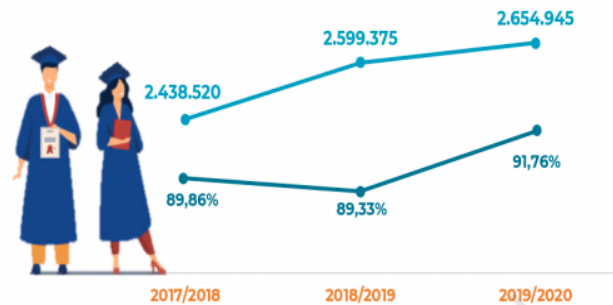
Pada dasarnya banyak hal yang menyebabkan pendidikan Indonesia mengalami keterpurukan diantaranya adalah fasilitas serta sarana prasarana yang tidak memadai sebagaimana dikutip dari BPS.go.Id pada tahun 2020 disebutkan bahwa



Dari data tersebut, maka lebih dari 70% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan mengalami kerusakan dan tentu saja hal ini akan mengganggu penyelenggaraan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut.

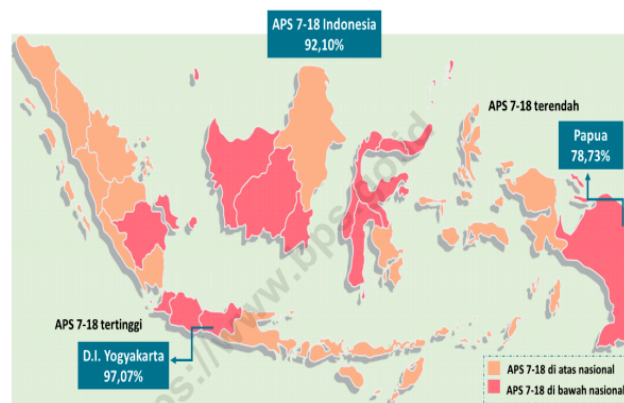
Selain hal tersebut dalam pelaksanaan pendidikan tidak Sekolah memiliki guru yang layak mengajar, sebagaimana dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dalam BPS.go.id dijelaskan bahwa

Gambar 2.6 Jumlah dan Persentase Guru Layak Mengajar Tahun Ajaran 2017/2018 - 2019/2020



Berdasarkan data tersebut peningkatan Prosentase guru yang memiliki kualifikasi layak mengajar pada jenjang SD, SMP, dan SMK yaitu 74,38 Persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu menjadi 90 persen, namun perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan presentase Guru layak mengajar pada jenjang SMA yang justru mengalami penurunan dari sebelumnya 97,95 persen turun menjadi 89,93, menurut data yang disampaikan oleh BPS penurunan ini adalah disebabkan banyaknya Guru yang memasuki masa pensiun dan sudah tidak mengajar lagi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan prosentase angka layak mengajar. Namun penurunan tersebut jika dicermatai merupakan kelemahan dalam pendidikan kita dimana hal ini menunjukkan kelemahan sistem Regenerasi Guru pada jenjang SMA sehingga hal ini berdampak pada menurunnya prosentase kelayakan guru.

Selain itu tidak semua provinsi memiliki statistik pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, ketimpangan pendidikan masih tampak nyata di Indonesia sebagaimana dikutip dari BPS.go.id tahun 2020 angka partisipasi sekolah (APS) 7-18 tahun menurut Provinsi



Dari data diatas kita bisa memahami bahwa masih terdapat beberapa Provinsi yang angka partisipasi sekolahnya terendah, sebagaimana provinsi papua menempati

angka partisipasi Sekolah terendah di Indonesia dan Daerah istimewa Yogyakarta menempati angka partisipasi Sekolah tertinggi di Indonesia yaitu 97,07%.

Selain hal tersebut diatas angka kesadaran pentingnya Pendidikan masih dirasakan masih tinggi sebagaimana yang dikutip dari BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 5.6 Persentase Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik, 2020

Karakteristik	Kelompok Umur		
	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,62	7,31	22,31
Tipe Daerah			
Perkotaan	0,31	5,84	18,11
Perdesaan	0,98	9,05	27,81
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,72	8,44	23,57
Perempuan	0,52	6,10	21,00
Status Disabilitas			
Non Disabilitas	0,57	7,16	22,00
Disabilitas	10,16	31,27	62,92

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Dari data diatas anak tidak sekolah lebih tinggi pada kelompok penduduk yang tidnggal di pedesaan dan jenis kelamin laki laki, salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah diantaranya adalah daerah tempat tinggal yang terpencil/tertnggal. Kemiskinan, serta belum optimalnya saran prasarana pendidikan untuk penyandang disabilitas.

1. Mengevaluasi pembelajaran dari selama pandemi

Dunia pendidikan Indonesia mengalami sebuah tantangan di masa pandemic covid 19, Pemerintah Indonesia demi memutus rantai penyebaran covid 19 dengan terpaksa menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan banyaknya interaksi antar Manusia, seperti perkantoran, tempat wisata, dan beberapa aktifitas tertentu yang berpotensi menimbulkan berkumpulnya konsentrasi masa.

Dunia Pendidikan adalah sektor yang menjadi perhatian khusus pemerintah dikarenakan sekolah adalah salah satu tempat yang memerlukan intensitas interaksi siswa yang sangat tinggi, bahkan semakin jenjang bawah semakin kecil pula para siswa mampu menerapkan protocol kesehatan. Selain itu demi untuk menjaga kesehatan bersama maka pemerintah menerapkan pembelajaran Daring.

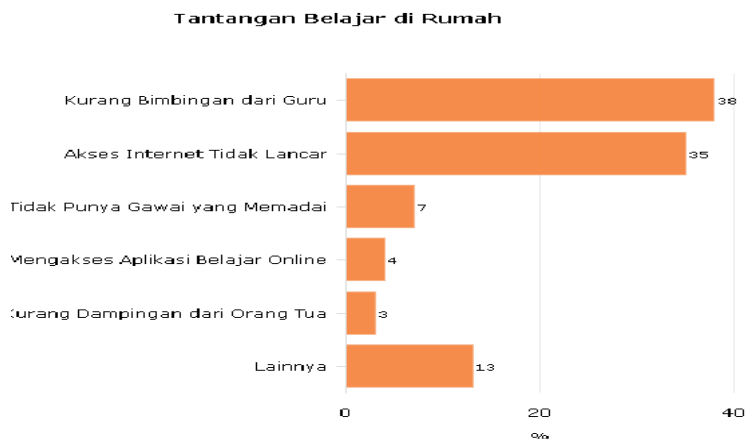
Penerapan pembelajaran Daring selama pandemi adalah sebuah tantangan tersendiri dalam Dunia Pendidikan, dimana Dunia Pendidikan tidak seluruhnya di desain dapat dilaksanakan secara Daring sebagaimana sistem pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan pada Universitas Terbuka.

Setiap jenjang pendidikan memiliki tantangan masing masing, setiap Wilayahpun memiliki hambatan tersendiri, namun pembelajaran Daring masih tetap menjadi sistem pembelajaran utama selama Masa Pandemi covid 19 ini.

Beberapa model pembelajaran daring pun dikemukakan seperti melalui *Whats up*, *Zoom*, *google Clasroom*, dan lain sebagainya, bahkan untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran daring pemerintah mengeluarkan sebuah aplikasi

pembelajaran yang dapat diakses gratis untuk jenjang dasar hingga menengah atas bernama Aplikasi Rumah belajar.

Dikutip dari Katadata.co.id pada 2020, survey yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting dimana dari Responden rentang usia 17 tahun keatas belajar atau kuliah online, 92% ,merasa banyak masalah atau cukup banyak masalah pembelajaran online.



Melihat data tersebut diatas maka pada dasarnya dilapangan banyak sekali permasalahan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran Daring, perlu adanya sebuah sistem pebelajaran yang *Massive*, yang akan diterapkan dalam Masa Pandemi maupun masa seteleh Pandemi.

2. Revolusi Pendidikan Sesuai SDGs paska pandemic covid 19

Merevolusi Pendidikan bukanlah sebuah hal yang mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan diperlukan perubahan *mindset* dan juga upaya bersama dari seluruh stake holder dunia pendidikan mulai dari *grassrod* hingga para pengambil kebijakan.

Selain itu Kesenambungan dalam pelaksanaan tujuan menjadi sebuah keharusan, hal ini menjadi penting karena dunia Pendidikan Indonesia seperti sebuah kapal yang tidak tahu harus berlabu dimana, setiap nahkodanya berganti maka berganti pula arah dan tujuannya, demikian juga dalam Dunia Pendidikan, ketika terjadi pergantian pengambil kebijakan maka tentu saja berubah pula arah Pendidikan di Indonesia.

Untuk itu diperlukan sebuah benang merah arah tujuan pendidikan di Indonesia, jika ditelusuri maka Indonesia harus merubah konsep pendidikan dimana jika sebelumnya dalam undang undang dasar pasal 31 ayat 2 yang pada pokoknya menjelasnya terjaminnya pendidikan bagi rakyat Indonesia perlahan harus berevolusi tidak hanya menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tapi juga harus menciptakan pendidikan yang berkualitas yang tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan penyediaan Pendidikan Berkualitas bagi seluruh Rakyat Indonesia pada dasarnya adalah merupakan sebuah Harmonisasi tujuan Pendidikan di Indonesia

yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development goals* (SDGs) yang telah diupayakan dari tahun 2000 dan pada akhirnya mencapai tujuan Global pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 nanti.

Salah satu tujuan SDGs adalah Pendidikan dimana dalam tujuan pembangunan tersebut khususnya dalam bidang pendidikan maka pemerintah diharapkan menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Untuk merealisasikan agenda tersebut maka pemerintah membuat target penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi rakyat Indonesia.

Berikut adalah tabel penjelasan mengenai konsep, tujuan, pelaksana serta target untuk menciptakan pendidika berkualitas di Indonesia

SDGs 04 Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	
Tujuan : Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana	
Pelaksana : Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membantu pencapaian SDGs 04 karena Pemerintah daerah berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami masyarakat untuk bersekolah.	
Target Target yang berkaitan dengan pemerintah daerah :	
1	pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH gratis, setara dan berkualitas
2	pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap PENGEMBANGAN MASA KANAKKANAK AWAL yang berkualitas, PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH
3	pada tahun 2030, menjamin AKSES YANG SETARA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas
4	pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk KEAHLIAN TEKNIS DAN KEJURUAN , untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha
5	pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin AKSES YANG SAMA TERHADAP SEMUA TINGKATAN PENDIDIKAN dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan
6	pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan

	budaya perdamaian dan antikekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya
7	MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN MUTU FASILITAS PENDIDIKAN yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

Untuk mengimplementasikan Pendidikan berkualitas Penulis beranggapan masih terdapat banyak pekerjaan rumah bagi kita semua terutama pengambil kebijakan, perlu adanya kerja keras dan usaha yang maksimal, mengingat menyelenggarakan pendidikan tidak hanya sekedar *trial and error* melainkan harus *massive* dan Komprehensif.

Indonesia sebagai sebuah Negara yang Meratifikasi SDGs dan Negara yang mewajibkan rakyatnya untuk berpendidikan minimal wajib belajar selama 12 tahun haruslah berhasil menankan esensi belajar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banyak hal yang perlu dibenahi terhadap pendidikan di Indonesia yang salah satunya adalah budaya gemar mencontoh hingga lupa berinovasi, sistem pendidikan Indonesia sering kali meniru pendidikan dari Negara Negara yang dianggap maju dan sering melupakan keadaan di lapangan dan nilai nilai luhur bangsa Indonesia, dimana banyak model model sistem pembelajaran asing yang diuji cobakan di Indonesia, tanpa memikirkan kondisi di lapangan, sebagai contoh adalah pelaksanaan AKM (assesmet Kompetensi Minimal), Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, kondisi geografisnya pastilah berbeda, fasilitas sarana prasarana yang berbeda, tenaga pendidik yang berbeda, tentu saja tidak dapat diukur dengan satu standar ukur yang sama. Perlu standart ukur ganda sesuai dengan kondisi daerah pendidikan yang sama, atau biarlah sekolah berinovasi menentukan standart ukurnya sendiri.

Pendidikan di Indonesia adalah mengejar nilai, orientasi ini hampir dipahami oleh seluruh pelajar di Indonesia, Guru dan orang tua siswa, siswa dikatakan baik jika memiliki nilai yang baik, sedangkan siswa yang dikatan tidak baik adalah ketika nilainya rendah, menurut penulis ini sebuah tolak ukur yang salah, Esensi pendidikan adalah bagaimana siswa memahami dan memberikan stimulus untuk belajar sepanjang hidupnya, bukan untuk merepresentasikan nilai saja. Konsep ini tentu saja harus dirubah jika ingin Merevolusi Pendidikan, karena pendidikan tidak hanya menyoal hasil dari nilai, lebih dari itu pendidikan adalah proses Memanusiakan Manusia.

Pemerintah menyediakan anggaran belajar yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, perlu adanya revolusi dan kesepakatan bersama bahwa anggaran tersebut haruslah digunakan untuk mengoptimalkan pendidikan bagi seluruh Rakyat Indonesia, perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan terhadap semua hal yang berpotensi terjadinya penyelewengan dana anggaran pendidikan. Perlu adanya supremasi hukum yang *equality* bagi siapapun yang bertujuan menciderai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Guru adalah ujung tombak pendidikan, namun tidak semua Guru mendapatkan upah yang layak atas dedikasinya mencerdaskan bangsa, terjadi ketimpangan antara guru yang berstatus aparatur Negara dan guru yang berstatus Honorer, padahal mereka memikul tanggung jawab yang sama,

mereka melaksanakan sistem yang sama. Perlu adanya Revitalisasi terhadap kesejahteraan guru terutama untuk guru Honorer. Selain itu perlu adanya sebuah sistem yang tidak menghambat tugas utama Guru untuk menyediakan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas untuk peserta didiknya, jangan sampai tugas administrasi seorang guru menjadi lebih banyak daripada Kewajibannya Mendidik.

Oleh karena itu pondasi pertama untuk menuju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah perubahan paradigma sebagaimana dijelaskan diatas, selain itu pemenuhan fasilitas serta sarana prasarana yang representatif haruslah tersedia merata di seluruh provinsi pada setiap kota, kabupaten, kecamatan sampai setiap kelurahan pada semua jenjang pendidikan.

Indonesia sebagai Negara yang memiliki bonus Demografi haruslah mengedepankan pendidikan yang berkualitas sebagaimana target yang dicanangkan pemerintah melalui program SDGs, karena bonus Demografi ini adalah sebuah potensi khusus untuk membangun Indonesia lebih maju.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai sebuah Negara yang memperhatikan pendidikan dan mewajibkan Pendidikan kepada Rakyatnya, dalam prakteknya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, saat proses Revitalisasi pendidikan tengah dilakukan, pendidikan Indonesia mengalami ujian dengan datangnya masa Pandemi, perlahan kondisi pandemi berangsur membaik, sehingga berimplikasi kondisi pendidikan yang juga berangsur membaik.

Paska pandemi seharusnya menjadi momentum untuk merevolusi pendidikan agar menjadi lebih baik, merealisasikan pendidikan sebagaimana target SDGs yang dicanangkan pemerintah, serta perlu adanya merubah paradigma pendidikan kita untuk menuju pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Statistik, 1390; Sujarwo, 2000; Nuarca, 2017; United cities and local government, 2017 dan Nuarca, I. ketut. 2017. *PENDIDIKAN NASIONAL Oleh I Ketut Nuarca Program Studi Sastra Jawa Kuno Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Agustus 2017*. 1–19.
- Statistik, B. P. 1390. *Potret pendidikan indonesia statistik pendidikan*. ص 8 شماره 99-117.
- Sujarwo, M. O. 2000. *PENDIDIKAN DI INDONESIA MEMPRIHATINKA*. 1995, 662.
- United cities and local government. 2017. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Kementerian PPN / Bappenas*, 12–14. <http://sdgsindonesia.or.id/index.php/sdgs/item/178-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>